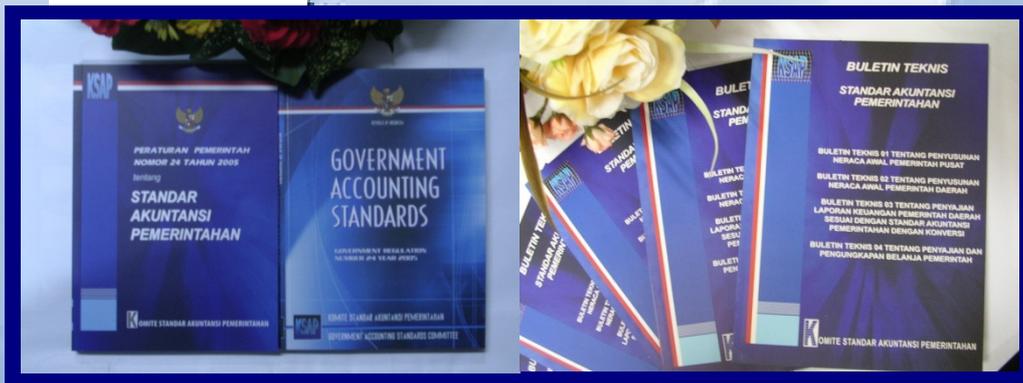




**KOMITE STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

# LAPORAN TAHUNAN 2009



**ACCOUNTABILITY**

**TRANSPARENCY**



# LAPORAN TAHUNAN

**ACCOUNTABILITY**

**TRANSPARENCY**

**SAMBUTAN  
KETUA KOMITE KONSULTATIF  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



**K**omite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengemban tugas yang berat dalam menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harus diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut disusun dengan memperhatikan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang baik, serta mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Tahun 2009 ini merupakan tahun bersejarah bagi KSAP karena telah berhasil menyelesaikan Draf SAP Berbasis Akrual. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebelum Draf SAP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, maka Draf SAP tersebut terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *Due Process* ini telah dilakukan oleh KSAP, dan kemudian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP yang telah disusun oleh KAP telah disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia guna pembahasan dan harmonisasi.

Selain itu, pada tahun 2009, KSAP juga melaksanakan tugas-tugas terkait dengan implementasi SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (*cash towards accrual*), seperti penyusunan Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) berserta sosialisasinya kepada unit-unit instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KSAP selama tahun 2009 tersebut telah disusun dengan lengkap dan sistematis dalam Laporan Tahunan 2009, agar dapat menjadi media akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya Presiden RI melalui Menteri Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja KSAP yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun, mengembangkan, dan membantu implementasi SAP. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2009 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja KSAP pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, April 2010

Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Selaku Ketua Komite Konsultatif,

Herry Purnomo

**PENGANTAR  
KETUA KOMITE KERJA  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



Laporan Tahunan 2009 ini disusun sebagai media akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP kepada Menteri Keuangan dan para pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini memuat rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai KSAP selama tahun 2009.

Setelah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, KSAP terus berupaya mendorong implementasi

SAP melalui sosialisasi, lokakarya (*workshop*), *Training of Trainers* (TOT), pelayanan publik, *help desk*, serta penyusunan Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan SAP.

Selama tahun 2009, KSAP telah menyelesaikan Draf SAP Berbasis Akrual yang terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Draf SAP Berbasis Akrual tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk kemudian diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna diberikan pertimbangan dan tanggapan. Pada bulan Juli 2009, KSAP telah menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP kepada Menteri Keuangan untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan KSAP, Laporan Tahunan 2009 ini juga telah memuat informasi keuangan KSAP tahun 2009.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, para anggota Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan agar dalam pelaksanaan kegiatan KSAP pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, April 2010  
Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

## DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komite Konsultatif .....	1
Sambutan Ketua Komite Kerja.....	2
Daftar Isi.....	3
Bab I    Pendahuluan.....	4
A.Organisasi dan Kedudukan KSAP .....	4
B.Tugas Pokok KSAP .....	5
Bab II    Rencana Kerja KSAP .....	8
A.Lingkungan Strategis .....	8
B.Rencana Strategis.....	8
Bab III    Kinerja KSAP .....	14
A.Capaian Kinerja.....	14
B.Pelaksanaan Kegiatan .....	14
C.Aspek Keuangan.....	19
D.Kendala dan Strategi Pemecahannya.....	20
Bab IV    Rencana Kerja Tahun 2010 .....	21
Bab V    Penutup.....	23

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004.

### **A. Organisasi dan Kedudukan KSAP**

KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres Nomor 3 Tahun 2009 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan dan mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan (*due process*). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 3 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

#### **Komite Konsultatif:**

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan sebagai Anggota;
4. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota;
5. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA sebagai Anggota; dan
6. Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa sebagai Anggota.

### **Komite Kerja:**

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. AB Triharta, Ak., MM sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sonny Loho, Ak., MPM sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM sebagai Anggota;
5. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM sebagai Anggota;
6. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM sebagai Anggota;
7. Yuniar Yanuar, Ak., MM sebagai Anggota;
8. Dr. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA sebagai Anggota; dan
9. Dr. Dwi Martani, SE, Ak. sebagai Anggota;

### **B. Tugas Pokok KSAP**

Berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2009, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sebagaimana tercantum dalam Keppres Nomor 3 Tahun 2009, dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP untuk perumusan dan pengembangan SAP, Komite Kerja membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja periode tahun 2009 terakhir kali dibentuk dan sebagaimana telah diubah pada tanggal 1 Juni 2009 dengan KEP-02/K.1/KSAP/VI/2009 beranggotakan 30 orang yang berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. Margustienny OA, Ak., MBA, Ketua;
2. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MBA, Wakil Ketua;
3. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota;
4. Amdi Very Dharma, Ak., MAcc, Anggota;
5. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota;
6. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota;
7. Chalimah Puji Astuti, SE, Ak., MAFIS, Anggota;
8. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, Anggota;
9. Mulat Handayani, SE, Ak., Anggota;
10. Hasanuddin, Ak., M.Ak., Anggota;

11. Farida Aryani, Ak., Anggota;
12. Eli Tamba, SE, Ak., MM, Anggota;
13. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota;
14. Dita Yuvrita, SE, Ak., Anggota;
15. Syaiful, SE, Ak., MM, Anggota;
16. Hamim Mustofa, Ak., Anggota;
17. M. Rizal Faisol, SST, Ak., Anggota;
18. Sugiyarto, SE., Ak., M.Sc., Anggota.
19. Iwan Kurniawan S., SE, M.Si., Ak., Anggota;
20. Mhd. Syahman Sitompul, SE, Ak., M.Si., Anggota;
21. Heru Novandi, SE, Ak., Anggota;
22. Muliani Sulya F., SE, Anggota.
23. Yusron Kamal, SE., MM, Anggota
24. Andri Fuadhy, SE, Anggota
25. Zulfikar Aragani, Anggota
26. Izharul Haq, SE, M.Fin, Anggota;
27. Wiwin Istanti, SE, Ak., M.Laws., Anggota;
28. Tio Novita Efriani, SE, Ak., MGPP, Anggota;
29. Mugiya Wardhani, SE., M.Si., Anggota; dan
30. Rahmat Mulyono, SE, Ak., M.Acc, Anggota.



Anggota KSAP Tahun 2009 (dokumentasi sekretariat KSAP)

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 547/KMK.06/2004 tentang Sekretariat KSAP dan sebagaimana terakhir telah diubah dengan KMK Nomor 340/KM.1/2009, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Mulat Handayani, SE, Ak., Ketua;
2. Hamim Mustofa, Ak., Wakil Ketua;
3. Izharul Haq, SE, M.Fin, Anggota;
4. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota;
5. Farida Aryani, Ak., Anggota;
6. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, Anggota;
7. Yusron Kamal, SE., MM, Anggota;

8. Andri Fuadhy, SE, Anggota; dan
9. Zulfikar Aragani, SE., Anggota.

Sekretariat KSAP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bertugas:

1. Memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka penyusunan dan sosialisasi SAP.
2. Mengelola website KSAP.
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

## BAB II

# RENCANA KERJA KSAP

Sesuai dengan tugas yang diembannya, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah berupa rencana kerja lima tahunan dan rencana kerja tahunan. Rencana kerja ini disusun sesuai dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Berbagai hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/daerah sebagaimana diuraikan di atas merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan KSAP dalam mencapai kinerjanya.

### ***A. Lingkungan Strategis***

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir mulai tahun anggaran 2006. Dengan demikian, Pemerintah perlu segera membangun sistem akuntansi yang mengacu kepada SAP. Kebutuhan ini tidak dapat ditunda lagi karena hanya ada waktu satu tahun sejak SAP disahkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SAP supaya dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meminimalkan asimetri informasi antara pemerintah dan pengguna laporan keuangan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah. Salah satu kriteria pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah kesesuaian laporan yang dimaksud dengan SAP. Dengan telah diterbitkannya PP tentang SAP, maka Pemerintah Pusat/daerah wajib menerapkan SAP dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis tersebut, KSAP memiliki komitmen untuk selalu bekerja secara terarah dan terencana, serta menuangkannya dalam suatu Rencana Strategis KSAP. Visi, Misi, Program, dan Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategi pada dasarnya mengarah pada pemberlakuan SAP yang dapat diterima oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan.

### ***B. Rencana Strategis***

Rencana strategis suatu organisasi memuat visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. KSAP telah merumuskan rencana strategis dengan visi, misi dan tujuan berikut ini.

**Visi :**

*"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas."*

**Misi :**

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

**Tujuan:**

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini:

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1: Rencana Kerja Tahun 2004 s.d. Tahun 2009**

<b>A. Tahun 2004</b>	
1. Penerbitan PP SAP	1. Penyusunan draf PP SAP 2. Pembahasan dengan Sekretariat Negara untuk penerbitan PP SAP
2. Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP	1. Penyusunan buletin teknis SAP <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neraca Awal</li> <li>▪ Bagan Perkiraan Standar</li> </ul> 2. Penyusunan interpretasi SAP ( 5 ISAP)
3. Sosialisasi PP SAP	Pelaksanaan Sosialisasi PP SAP di lima kota
4. Draft Publikasian (DP) SAP berbasis akrual	1. Penyusunan standar akuntansi berbasis akrual (KK + 7 PSAP) – Sesuai <i>due process</i> KSAP kecuali <i>public hearing</i> dan permintaan pertimbangan BPK 2. Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i> DP SAP akrual 3. Finalisasi Draft SAP akrual
5. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: Pengkajian standar dan PRAKTIK akuntansi internasional Seminar/kongres/konferensi internasional
<b>B. Tahun 2005</b>	
1. Penyusunan SAP dan Derivasinya	1. Finalisasi RPP tentang SAP 2. Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP 3. Penyusunan Draft SAP berbasis akrual <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan 4 Draft SAP berbasis akrual</li> <li>▪ Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i></li> <li>▪ Pelaksanaan <i>Public Hearing</i></li> <li>▪ Finalisasi Draft SAP</li> </ul>
2. Peningkatan Kompetensi SDM dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan	1. Sosialisasi SAP di 7 kota 2. Pengembangan SDM KSAP <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengkajian standar dan PRAKTIK akuntansi internasional</li> <li>▪ Seminar/kongres/konferensi internasional</li> </ul>
<b>C. Tahun 2006</b>	
1. Draft Publikasian (DP) SAP berbasis akrual	1. Penyusunan DP standar akuntansi berbasis akrual 2. Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i> DP SAP akrual 3. Pelaksanaan <i>Public Hearings</i> 4. Finalisasi Draft SAP akrual
2. Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP	1. Pelaksanaan Lokakarya ( <i>Workshop</i> ) 2. Penyelenggaraan <i>Helpdesk</i> 3. Pemeliharaan <i>Website</i> KSAP 4. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i>
3. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengkajian standar dan PRAKTIK akuntansi internasional</li> <li>▪ Seminar/kongres/konferensi internasional</li> </ul>
<b>D. Tahun 2007</b>	
1. Draft PSAP berbasis Akrual	1. Penyusunan DP standar akuntansi berbasis akrual 2. Pelaksanaan <i>Public Hearing</i> 3. Penyempurnaan Draft Kerangka Konseptual dan PSAP

berbasis akrual	
2. Penerbitan PP Standar Akuntansi berbasis Akrual	
3. Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Lokakarya/<i>Workshop</i></li> <li>2. Penyelenggaraan <i>Helpdesk</i></li> <li>3. Pemeliharaan <i>Website</i> KSAP</li> <li>4. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i></li> </ol>
4. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengkajian standar dan PRAKTIK akuntansi internasional</li> <li>▪ Seminar/kongres/konferensi internasional</li> </ul>
<b>E. Tahun 2008</b>	
1. Draf PSAP berbasis Akrual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyempurnaan DP Kerangka Konseptual dan PSAP berbasis akrual</li> <li>2. <i>Limited Hearing</i> PSAP Akrual</li> <li>3. Permintaan Pertimbangan BPK dan Pembahasan</li> </ol>
2. Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan <i>Workshop</i>/Sosialisasi SAP dan Bultek Baru SAP CTA</li> <li>5. Penyelenggaraan <i>Helpdesk</i></li> <li>6. Pemeliharaan <i>Website</i> KSAP</li> <li>7. Penyelenggaraan <i>International Events</i> dan pembentukan asosiasi regional <i>standards setter</i></li> <li>8. Survei/Riset Implementasi SAP</li> <li>9. Penyusunan Kamus Istilah Akuntansi Pemerintahan</li> </ol>
3. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengkajian standar dan PRAKTIK akuntansi internasional</li> <li>▪ Seminar/kongres/konferensi internasional</li> </ul>
<b>F. Tahun 2009</b>	
1. Finalisasi Draf SAP Berbasis Akrual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan Pertimbangan BPK dan Pembahasan</li> <li>2. Penyusunan Draf Final SAP Berbasis Akrual</li> <li>3. Penyusunan RPP tentang SAP Berbasis Akrual</li> </ol>
2. Penyusunan Buletin Teknis SAP CTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bultek Utang</li> <li>2. Bultek Bantuan Sosial</li> <li>3. Bultek Hibah</li> <li>4. Bultek Aset Tetap</li> <li>5. Bultek Aset Tak Berwujud</li> <li>6. Bultek Penerusan Pinjaman</li> </ol>
3. Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop SAP CTA dan Buletin Teknis Baru SAP CTA</li> <li>2. Penyelenggaraan <i>Helpdesk</i></li> <li>3. Pemeliharaan <i>Website</i> KSAP</li> <li>4. Survei/Riset Implementasi SAP</li> </ol>
4. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengkajian standar dan PRAKTIK akuntansi internasional</li> <li>▪ Seminar/kongres/konferensi internasional</li> </ul>

Berdasarkan rencana kerja jangka menengah, program kerja dan kegiatan KSAP tahun 2009 adalah sebagai berikut:

### 1. *Finalisasi Draft Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan penerapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual mulai tahun 2008. Untuk itu, mulai tahun 2006, KSAP telah menyusun draf SAP Berbasis Akrua. Indikator kegiatan ini berupa terselesaikannya draf Kerangka Konseptual dan draf PSAP Berbasis Akrua. Pada tahun ini, sasaran kinerja KSAP adalah penyusunan dan penyempurnaan draf kerangka konseptual dan 12 (dua belas) draf SAP berbasis akrual.

### 2. *Limited Hearing Draft Standar Akuntansi Pemerintahan*

Sesuai dengan *due process* penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebelum dimintakan pertimbangan BPK, terlebih dahulu dilakukan *limited hearing* terhadap draf SAP Berbasis Akrua guna mendapat masukan dari para praktisi, akademisi, dan pemerhati akuntansi pemerintah.

### 3. *Permintaan Pertimbangan BPK dan Pembahasan*

Sesuai dengan *due process* SAP, draf SAP harus mendapat pertimbangan dari BPK. Indikator kegiatan ini adalah penyampaian draf SAP berbasis akrual pada BPK untuk mendapat pertimbangan.

### 4. *Penyusunan Derivasi Standar Akuntansi Pemerintahan*

#### a. **Penyusunan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan**

KSAP akan menerbitkan Interpretasi SAP (IPSAP) yang dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari kesalahan tafsir para pengguna SAP.

#### a. **Penyusunan Buletin Teknis SAP**

KSAP menerbitkan buletin teknis untuk memberikan arahan/pedoman penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya Buletin Teknis.

### 5. *Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan*

#### a. **Workshop Buletin Teknis SAP**

SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah mulai tahun anggaran 2005. Untuk itu, KSAP akan mengadakan workshop mengenai buletin teknis. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat

memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2009.

**b. Pengembangan kemampuan SDM KSAP**

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik untuk internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

## 6. Lain-lain

**a. Pemeliharaan Website KSAP**

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

**b. Penyelenggaraan Help Desk**

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP akan membentuk *helpdesk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya.

**c. Survei/Riset Implementasi SAP**

Survei/Riset Implementasi SAP ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana para pengguna SAP menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, dan masalah-masalah apa saja yang ditemukan selama penerapan SAP tersebut.

**d. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

## BAB III

# KINERJA KSAP

### A. *Capaian Kinerja*

Sejak awal pembentukannya, KSAP telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka finalisasi SAP. Sampai dengan akhir tahun 2009, KSAP telah menyelesaikan draf SAP Berbasis Akruwal (Kerangka Konseptual dan 12 PSAP) serta menetapkan 1 (satu) Buletin Teknis yaitu Buletin Teknis No. 08 tentang Akuntansi Utang. Kegiatan finalisasi SAP beserta penyusunan derivasinya masih terus dilaksanakan oleh KSAP pada tahun 2009 dan pada tahun-tahun berikutnya. Ringkasan capaian kinerja KSAP pada tahun 2009 adalah:

- Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Finalisasi draf SAP Berbasis Akruwal yang terdiri dari Kerangka Konseptual dan 12 PSAP setelah mendapat pertimbangan dari BPK;
- Penetapan Buletin Teknis SAP No. 08 tentang Akuntansi Utang;
- Penyusunan 5 (lima) draf buletin teknis, yaitu Buletin Teknis tentang Akuntansi Bantuan Sosial, Buletin Teknis tentang Akuntansi Hibah, Buletin Teknis tentang Akuntansi Aset Tetap, Buletin Teknis tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud, dan Buletin Teknis tentang Akuntansi Penerusan Pinjaman.
- Penyelenggaraan *Workshop* Buletin Teknis;
- Diskusi Terbatas Akuntansi Pemerintahan “Implementasi SAP Berbasis Akruwal, Strategi dan pentahapannya di Indonesia;”
- Pengembangan SDM dengan mengirim SDM KSAP untuk mengikuti berbagai seminar, kongres dan konferensi akuntansi baik di luar maupun dalam negeri; dan
- Sosialisasi SAP pada beberapa Pemda dan Perguruan Tinggi.

### B. *Pelaksanaan Kegiatan*

#### 1. *Finalisasi Draft Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akruwal dilakukan selambat-lambatnya tahun 2008. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana lima tahunan, KSAP telah menyelesaikan penyusunan draf SAP Berbasis Akruwal yang terdiri dari draf Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan dan 12 draf SAP Berbasis Akruial dengan menggunakan pendekatan menyesuaikan PSAP *cash toward accrual* (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) dengan PSAP berbasis akrual yang diadaptasi dari IPSAS dan berbagai literatur lainnya.

Keduabelas Draft SAP Berbasis Akruial tersebut adalah:

1. Penyajian Laporan Keuangan;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Arus Kas;
4. Catatan atas Laporan Keuangan;
5. Akuntansi Persediaan;
6. Akuntansi Investasi;
7. Akuntansi Aset Tetap;
8. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. Akuntansi Kewajiban;
10. Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Estimasi dan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan Mendasar dan Pos Luar Biasa;
11. Laporan Keuangan Konsolidasian; dan
12. Laporan Operasional.

Pada tahun 2008, KSAP telah menyelesaikan Draft SAP Berbasis Akruial. *Due proses* berikutnya yang harus dilalui adalah meminta pertimbangan Draft SAP tersebut kepada BPK yang dilakukan pada bulan Februari 2009. Tindak lanjut dari permintaan pertimbangan ini adalah adanya pembahasan antara Tim Pembahas BPK dengan KSAP pada bulan Mei 2009. Berdasarkan pertimbangan BPK, KSAP menyempurnakan Draft SAP Berbasis Akruial yang diselesaikan pada bulan Juni 2009.



Pembahasan Draft SAP Akruial BPK –KSAP (dokumentasi sekretariat KSAP)

Langkah berikutnya yang telah dilakukan oleh KSAP adalah menyiapkan RPP SAP dan mengajukan RPP tersebut kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan RPP SAP kepada Menteri Hukum dan HAM pada bulan Agustus 2009. Kemudian pada tanggal 19 November 2009 bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah dilaksanakan rapat pembahasan harmonisasi RPP SAP. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, KSAP memperbaiki kembali RPP SAP.



Pengharmonisasia RPP SAP Akrual KEMENTERIAN Hukham, BPK, IAI dan KSAP

## 2. *Penyusunan Derivasi Standar Akuntansi Pemerintahan*

Pada tahun 2009 ini, KSAP merencanakan menyusun beberapa buletin teknis dalam rangka mendukung implementasi PP Nomor 24 Tahun 2005. Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan para *stakeholders*. Dalam Tahun 2009, KSAP telah menetapkan 1 (satu) buah buletin teknis yaitu Buletin Teknis Nomor 8 tentang Akuntansi Utang. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2009, KSAP telah menerbitkan 8 (delapan) buletin teknis dan 1 (satu) Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP), yaitu:

1. Buletin Teknis Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat;
2. Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;
3. Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi;
4. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja;
5. Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan;
6. Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang;
7. Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
8. Buletin Teknis Nomor 08 tentang Akuntansi Utang;
9. IPSAP Nomor 01 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing.

Disamping itu, terdapat beberapa buletin teknis yang dikembangkan dan hingga akhir tahun 2009 sedang dalam proses pembahasan. Beberapa draf buletin teknis SAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buletin Teknis tentang Bantuan Sosial;
2. Buletin Teknis tentang Hibah;
3. Buletin Teknis tentang Aset Tetap;
4. Buletin Teknis tentang Aset Tak Berwujud; dan
5. Buletin Teknis tentang Penerusan Pinjaman.



Pembahasan Bultek oleh KSAP (dok. Sekretariat KSAP 2009)

### 3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

#### Kegiatan 1: Workshop Buletin Teknis : Akuntansi Penyusutan, Akuntansi Piutang Akuntansi Dana Bergulir, dan Akuntansi Utang

Pada tahun 2009 ini, KSAP telah menyelenggarakan *Workshop* SAP dan Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Penyusutan, Akuntansi Piutang, Akuntansi Dana Bergulir, dan Akuntansi Utang. *Workshop* tersebut diadakan pada tanggal 5 Oktober 2009 di Jakarta dan tanggal 8 Oktober 2009 di Denpasar. *Workshop* ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi atas 3 (tiga) buah buletin teknis yang diterbitkan tahun 2008 yaitu Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan, Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang, dan Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, serta sosialisasi awal atas buletin teknis yang baru diterbitkan tahun 2009 yaitu Buletin Teknis Nomor 08 tentang Akuntansi Utang. *Workshop* ini dihadiri para praktisi baik dari lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) maupun dari kementerian kembang/negara yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah.



Workshop Buletin Teknis SAP

(dokumentasi Sekretariat KSAP 2009)

## Kegiatan 2: Pengembangan Kemampuan SDM KSAP

Di bidang pengembangan SDM, KSAP mengirim beberapa anggotanya mengikuti seminar, kongres, dan konferensi baik di dalam negeri maupun luar negeri, antara lain: Seminar Nasional Akuntansi di Malang tanggal 17 – 18 Juli 2009, Konferensi Nasional Akuntansi VI di Bandung tanggal 13 – 15 Agustus 2009, *The First Meeting of Asean Oceanian Standard Setter Group* di Kuala Lumpur-Malaysia tanggal 3 – 6 November 2009, dan *The 16<sup>th</sup> Asean Federation of Accountants Conference* di Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam tanggal 8 – 10 Desember 2009.



*The First Meeting of Asean Oceanian Standard Setter Group* di Kuala Lumpur-Malaysia

## Kegiatan 3: Pemeliharaan Website KSAP

Dalam rangka memberi informasi mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah membangun *Website* KSAP dengan alamat: <http://www.ksap.org> yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan *Website* ditujukan untuk mengekspose PSAP dan Draf PSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung *website*. Pada *website* tersebut juga tersedia email para anggota KSAP.



[Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 dapat didow](#)

### Publikasi

[The 1st ASEAN Meeting of Governmental Accounting Standards Setters Bali, August 5-6, 2010](#)  
The Indonesian Governmental Accounting Standards Committee (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan or KSAP) invites you to the 1st ASEAN Meeting of Governmental Accounting Standards Setters that will be held in Bali, Indonesia, on 5th - 6th of August 2010. The meeting will provide an important forum for the interaction of different experiences between participants in order

Halaman depan website KSAP : [www.ksap.org](http://www.ksap.org)

### What's New

[IPSAP Nomor 01 tentang Selisih Kurs](#)

[Modul Materi TOT](#)

[Slide Materi TOT](#)

[Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05](#)

#### Kegiatan 4: Penyelenggaraan *Help Desk*

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP lainnya. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP telah membentuk tim *helpdesk* yang terdiri dari beberapa anggota Komite Kerja dan Kelompok Kerja yang bertugas menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP dan memberikan pemecahannya.

#### Kegiatan 5: Pelayanan Publik

Pada tahun 2009, KSAP telah memenuhi beberapa permintaan dari berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya untuk menjadi nara sumber tentang SAP. Selain itu KSAP juga membantu memberikan konsultasi teknis atas implementasi SAP kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti akuntansi dan pelaporan pendapatan minyak bumi dan gas alam (*migas*), perlakuan koreksi nilai wajar aset tetap, perlakuan akuntansi atas kas lainnya di bendahara pengeluaran, pengakuan aset tak berwujud, pengakuan investasi pada lembaga keuangan internasional dan *promissory notes*, dan perlakuan akuntansi aset tanggul Lumpur Sidoarjo.



Pembahasan Pedoman Akuntansi BHP KSAP, IAI dan Kemendiknas

### C. Aspek Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2009, KSAP mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp3.896.140.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSAP – Departemen Keuangan. Dari anggaran tersebut, KSAP telah merealisasikan sebesar Rp3.313.267.192 atau 85,04% dari pagu anggaran.

Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi belanja KSAP Tahun Anggaran 2009:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah revisi	Realisasi Belanja	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	-		
52	Belanja Barang	3.796.640.000	3.216.592.192	84,72%
53	Belanja Modal	99.500.000	96.675.000	97,16%
<b>Jumlah</b>		<b>3.896.140.000</b>	<b>3.313.267.192</b>	<b>85,04%</b>

Laporan Keuangan KSAP Tahun 2009, selaku satuan kerja, secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

#### ***D. Kendala dan Strategi Pemecahannya***

Pada tahun 2009, terdapat beberapa buletin teknis yang direncanakan dapat diselesaikan dan diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009 tidak dapat dicapai. Hal ini disebabkan masih diperlukannya kajian yang lebih mendalam agar buletin teknis tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, selama tahun 2009, KSAP juga banyak menerima pertanyaan/konsultasi dari berbagai unit instansi baik tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait permasalahan implementasi SAP yang harus dibahas secara hati-hati dan memerlukan waktu pembahasan yang cukup panjang. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KSAP telah membentuk tim-tim kecil yang bertugas mengkaji dan menjawab atas pertanyaan/konsultasi dari berbagai instansi pemerintah.

## BAB IV

# RENCANA KERJA TAHUN 2010

Untuk mendukung implementasi SAP tahun 2010 dan pengembangan SAP berbasis akrual, pada tahun 2010 KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Penetapan PP SAP Berbasis Akrual

Pada tahun 2009 KSAP telah melakukan pembahasan secara mendalam dengan BPK dalam rangka pelaksanaan *due process* permintaan pertimbangan kepada BPK. Setelah mendapat pertimbangan dan pembahasan dengan BPK, maka Draf SAP Berbasis Akrual dapat difinalisasi menjadi Peraturan Pemerintah pengganti PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP. Diharapkan pada tahun 2010 penetapan atas RPP SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan.

### 2. Penyusunan Buletin Teknis SAP CTA

Pada tahun 2010, KSAP akan melakukan finalisasi 5 (lima) buletin teknis SAP. Tujuan dari penyusunan buletin teknis adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dalam menyusun laporan keuangan, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

### 3. Workshop SAP (*accrual*) dan Buletin Teknis Baru SAP CTA

Pada tahun 2010, KSAP akan mengadakan *workshop* mengenai SAP Berbasis Akrual dan buletin teknis baru SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pada tahun 2010, KSAP juga merencanakan mengadakan sosialisasi melalui media elektronik.

### 4. Pemeliharaan Website KSAP

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya. Para pengunjung dapat mendownload dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs [www.ksap.org](http://www.ksap.org).

## 5. Pemeliharaan *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* yang telah dibentuk akan terus melakukan tugasnya pada tahun 2010. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently Asked Question* (FAQ) yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

## 6. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

## 7. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan PRAKTIK akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

## 8. Survei/Riset Implementasi SAP

Survei/Riset Implementasi SAP ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana para pengguna SAP menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, dan masalah-masalah apa saja yang ditemukan selama penerapan SAP tersebut. Selain itu, riset juga dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan implementasi SAP berbasis akrual. Akan dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka melakukan riset ini. KSAP akan menampilkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti terkait pelaksanaan SAP.

## 9. *International Events*

Untuk mensejajarkan KSAP dengan *government/public accounting standard setting body* di dunia internasional, maka pada tahun 2010 KSAP akan menyelenggarakan *International Events*, yaitu *The 1<sup>st</sup> ASEAN Meeting of Governmental Accounting Standards Setters*. Namun, hal ini masih bersifat tentatif karena menunggu kesediaan beberapa negara ASEAN untuk ikut berpartisipasi.

## BAB V

# PENUTUP

Laporan Tahunan 2009 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP dan diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan serta memberi dukungan teknis implementasi SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sekretariat :  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat  
Telp/Fax. 021 3524551  
Website. ksap.org  
Email. webmaster@ksap.org ; ksap\_info@yahoo.com